



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PERUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA
UNIT KERJA : DEWAN PENGAWAS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIAWAN
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 1012119

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.300.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/144 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
3. Tanah Seluas 964 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 288 m2/200 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **293.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA CAMRY Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
3. MOTOR, SUZUKI BRUGMANN Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **200.000.000**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----
Rp. 4.793.000.000

III. HUTANG

Rp. ----
Rp. 4.793.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.